

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Tinjauan teoritis dalam penelitian ini akan menjelaskan *grand theory* dan *middle theory* yang digunakan dalam penelitian. *Grand theory* dalam penelitian ini adalah Teori Ekonomi Pembangunan.

2.1.1 Grand Theory : Dynamic Theory of Production

Ilmu ekonomi pembangunan merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang khususnya mempelajari tentang kondisi perekonomian yang terjadi pada suatu negara. Istilah ekonomi pembangunan mengacu pada pemahaman ilmu ekonomi yang diterapkan dalam analisis masalah dan kebijakan perekonomian pada negara-negara yang belum maju (*underdeveloped countries*) dan pada negara-negara berkembang (*developing countries*).

Dari sudut pandang ilmu ekonomi, pembangunan ekonomi pada dasarnya adalah upaya untuk memperluas kemampuan dan kebebasan memilih (*increasing the ability and freedom to choice*). Tercapainya hal tersebut merupakan indikator bahwa manusia secara individu maupun kolektif dapat meningkatkan utilitas/kualitas hidupnya. Karenanya yang harus dibangun terutama adalah kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana dan kelembagaan-kelembagaan ekonomi modern. Rahardja & Manurung (2018: 311-312) berpendapat bahwa dengan dibangunnya hal-hal tersebut diatas, diharapkan kesejahteraan rakyat makin tinggi, terutama makin baik, efisien, dan adilnya alokasi sumber daya ekonomi.

Menurut Arsyad (2010) mendefinisikan ekonomi pembangunan sebagai suatu cabang ilmu ekonomi yang menganalisa masalah-masalah yang dihadapi oleh negara berkembang dalam upaya mencari cara-cara untuk mengatasi berbagai masalah dalam rangka mempercepat pembangunan ekonomi. Siahaan (2013: 2) mendefinisikan ekonomi pembangunan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita riil mengalami kenaikan dalam jangka panjang atau jika laju pembangunan lebih besar daripada laju pertumbuhan penduduk sehingga pendapatan per kapita riil meningkat.

Lebih lanjut, Siahaan (2013: 3) menjelaskan bahwa pada hakekatnya kajian dalam ekonomi pembangunan dapat dimasukkan dalam dua golongan. Pembahasan mengenai pembangunan ekonomi, baik yang bersifat deskriptif maupun yang bersifat lebih analitis, bertujuan untuk memberikan gambaran tentang berbagai sifat perekonomian dan masyarakat di negara-negara berkembang dan implikasi sifat-sifat ini kepada kemungkinan untuk membangun ekonomi kawasan tersebut.

Selanjutnya pembahasan mungkin juga bersifat memberikan berbagai pilihan kebijaksanaan pembangunan yang dapat dilaksanakan dalam usaha untuk mempercepat proses pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang. Berdasarkan kedua sifat ini maka analisis ekonomi pembangunan dapatlah didefinisikan sebagai suatu cabang ilmu ekonomi yang bertujuan untuk menganalisis masalah-masalah yang dihadapi oleh negara-negara berkembang dan mendapatkan cara-cara untuk mengatasi masalah-masalah tersebut agar negara-negara yang bersangkutan dapat membangun ekonominya menjadi lebih cepat lagi.

Pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi ditambah dengan perubahan. Putra (2019) menjelaskan bahwa artinya, ada atau tidaknya pembangunan ekonomi dalam suatu negara pada suatu tahun tertentu tidak saja diukur dari kenaikan produksi barang dan jasa yang berlaku dari tahun ketahun, tetapi juga perlu diukur dari perubahan lain yang berlaku dalam berbagai aspek kegiatan ekonomi seperti perkembangan pendidikan, perkembangan teknologi, peningkatan dalam kesehatan, peningkatan dalam infrastruktur yang tersedia, peningkatan dalam pendapatan serta kemakmuran masyarakat.

Keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu wilayah dapat dilihat dari pendapatan per kapita masyarakat yang mengalami peningkatan secara terus-menerus (dalam jangka panjang) dan disertai terjadinya perubahan fundamental dalam struktur ekonomi. Dengan demikian, pembangunan ekonomi lebih bersifat kualitatif, bukan hanya penambahan produksi, tetapi juga terdapat perubahan-perubahan dalam struktur produksi dan adanya alokasi input pada berbagai sektor perekonomian seperti dalam lembaga pengetahuan atau pendidikan, dan teknik.

Pembangunan ekonomi tidak terlepas dari pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembangunan ekonomi. Yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Suatu wilayah dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi peningkatan GNP riil di wilayah tersebut.

Dari definisi diatas dapat dikatakan bahwa pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi memiliki arah yang sama yakni dalam perkembangan ekonomi. Akan tetapi, pembangunan ekonomi akan mengarah pada pertumbuhan ekonomi yang diiringi dengan berbagai perubahan, seperti perubahan struktur, corak kegiatan ekonomi, tingkat pertumbuhan penduduk serta perubahan-perubahan kelembagaan dan pengetahuan teknik. Maka dapat diartikan bahwa pembangunan ekonomi adalah proses perubahan yang terus-menerus menuju perbaikan dalam

peningkatan produk per kapita, pemerataan pembangunan, dan taraf hidup masyarakat serta adanya perbaikan sistem kelembagaan.

Harrod (1939) dalam mengkaji pembangunan ekonomi secara lebih spesifik mengusulkan *Dynamic Theory* yang menyediakan kerangka konsep yang relevan dengan studi perubahan analog dengan yang disediakan oleh teori statis. Dasar aksiomatik dari teori ini terdiri dari tiga proposisi, yaitu, bahwa tingkat pendapatan masyarakat adalah penentu terpenting dari penawaran simpanan (*saving*), bahwa tingkat kenaikan pendapatannya merupakan penentu penting dari permintaannya akan tabungan, dan bahwa permintaan sama dengan penawaran. *Ibid.* menekankan ketidak-stabilan yang melekat pada kesetimbangan dinamis dan pentingnya memerangi kecenderungan osilasi. *Ibid.* juga berbicara tentang perbedaan antara investasi dan tabungan *ex-post* dan *ex-ante* serta pentingnya pengeluaran modal jangka panjang.

Rostow (1959) mengusulkan serangkaian tahapan pertumbuhan ekonomi yang dinamis, yang dapat ditetapkan sebagai berikut: masyarakat tradisional; persiapan lepas landas; lepas landas; menuju kedewasaan; dan masa konsumsi massal yang tinggi. *Ibid.* menjabarkan bahwa ketika masyarakat bergerak menuju kematangan teknologi, struktur dan kualitas tenaga kerja berubah, sehingga proporsi penduduk di bidang pertanian dan kehidupan pedesaan menurun. Angkatan kerja yang muncul kemungkinan akan mengorganisir dirinya sendiri dengan efektivitas yang meningkat di pasar tenaga kerja dan untuk melihat bahwa peradaban industri yang menjadi bagiannya dapat menawarkan tingkat dan jenis konsumsi yang sebelumnya tidak dianggap sebagai kemungkinan yang realistis secara massal. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pertumbuhan ekonomi yang dinamis pasti terjadi transformasi struktural.

2.1.2 Middle Theory : Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan dalam suatu perekonomian. Kemajuan suatu perekonomian ditentukan oleh besarnya pertumbuhan yang ditunjukkan oleh perubahan output nasional. Adanya perubahan output dalam perekonomian merupakan analisis ekonomi jangka pendek.

2.1.2.1 Definisi Pertumbuhan Ekonomi

Sukirno (2000) mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai suatu ukuran kuantitatif yang menggambarkan perkembangan suatu perekonomian dalam suatu tahun tertentu apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Sedangkan menurut Arsyad (2010), pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan PDB atau PNB tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk, dan apakah terjadi perubahan struktur ekonomi atau perbaikan sistem kelembagaan atau tidak.

Putong (2008) berpendapat, pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan pendapatan nasional secara berarti (dengan meningkatnya pendapatan perkapita) dalam suatu periode perhitungan tertentu.

Menurut Mankiw (2004) PDB sering dianggap sebagai ukuran terbaik dari kinerja perekonomian. Tujuan PDB adalah meringkas aktivitas ekonomi dalam suatu nilai uang tertentu selama periode waktu tertentu. Ada dua pendekatan untuk melihat besaran PDB, pertama melihat PDB sebagai pendapatan total dari setiap orang di dalam perekonomian. Cara lain melihat PDB adalah sebagai pengeluaran total atas output barang dan jasa perekonomian.

2.1.2.2 Teori Pertumbuhan Ekonomi

Secara umum teori tentang pertumbuhan ekonomi dapat di kelompokkan menjadi dua, yaitu teori pertumbuhan ekonomi klasik dan teori pertumbuhan ekonomi modern. Pada teori pertumbuhan ekonomi klasik, analisis di dasarkan pada kepercayaan dan efektivitas mekanisme pasar bebas. Teori ini merupakan teori yang dicetuskan oleh para ahli ekonom klasik seperti Adam Smith dan David Ricardo. Teori lain yang menjelaskan pertumbuhan ekonomi adalah teori ekonomi modern. Teori pertumbuhan Harrod-Domar merupakan salah satu teori pertumbuhan ekonomi modern, teori ini menekankan arti pentingnya pembentukan investasi bagi pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi investasi maka akan semakin baik perekonomian, investasi tidak hanya memiliki pengaruh terhadap permintaan agregat tetapi juga terhadap penawaran agregat melalui pengaruhnya terhadap kapasitas produksi. Dalam perspektif yang lebih panjang investasi akan menambah stok kapital.

2.1.2.3 Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator penting guna menganalisis pembangunan ekonomi yang terjadi disuatu negara. “pertumbuhan” (*growth*) tidak identik dengan “pembangunan” (*development*). Pertumbuhan ekonomi adalah satu syarat dari banyak syarat yang diperlukan dalam proses pembangunan (Meier, 1989). Pertumbuhan ekonomi hanya mencatat peningkatan produksi barang dan jasa secara nasional, sedangkan pembangunan berdimensi lebih luas.

2.1.3 Applied Teori

2.1.3.1 Penguatan Neraca Perdagangan

2.1.3.1.I Neraca Perdagangan

Neraca Perdagangan merupakan jejak rekam transaksi ekonomi yang dilakukan warga suatu negara dengan seluruh dunia dalam jangka waktu tertentu (Levi, 2009). Secara lebih spesifik Pujoalwanto (2014) menjelaskan bahwa neraca perdagangan adalah sebuah catatan yang berisi jumlah atau informasi kegiatan ekspor dan impor suatu negara.

2.1.3.1.II. Elemen Neraca Perdagangan

Ekspor

Ekspor merupakan barang dan/atau jasa yang dibeli oleh pembeli asing, sementara impor adalah barang yang diproduksi diluar negeri dan dibeli oleh pembeli didalam negeri (Froyen, 2002). Ekspor bermanfaat untuk mengurangi dampak dari rapuhnya pasar dalam negeri dengan cara melebarkan cakupan target pasar ke pasar global (Bakari & Mabrouki, 2017). Ekspor juga bermanfaat untuk memperoleh pengetahuan tentang bagaimana memasarkan produk di pasar asing (Muchdie et al., 2018).

Impor

Impor merupakan sebuah aktivitas dimana suatu negara memasukkan barang atau jasa dari negara lain ke dalam negeri. Impor dikatakan sebagai sebuah indikator dari ketidakmampuan sebuah negara untuk memenuhi kebutuhannya sendiri (Bakari & Mabrouki, 2017). Thirafi (2020) menyatakan bahwa melalui neraca perdagangan dapat dilihat seberapa kokoh perekonomian dan perdagangan suatu negara dalam menghadapi krisis.

Secara umum pergerakan neraca perdagangan Indonesia pada tahun 2000 hingga tahun 2020 menunjukkan tren yang cenderung menurun. Pada beberapa tahun terjadi penguatan, hanya saja penguatan-penguatan tersebut disusul dengan penurunan bahkan defisit yang semakin dalam. Krisis yang terjadi pada tahun 2008 menunjukkan efeknya kepada neraca perdagangan Indonesia. Meskipun tergolong sebagai Negara yang terdampak paling kecil, neraca perdagangan Indonesia pada tahun tersebut mengalami penurunan sebesar 80,26% dibandingkan dengan periode sebelumnya. Hal ini antara lain juga didorong oleh adanya peningkatan impor sebesar 73,48% pada tahun tersebut, yang didominasi oleh impor non-migas. Impor non migas saat itu meningkat sebesar 87,75% dibandingkan periode sebelumnya dan menjadi tekanan besar kepada neraca perdagangan Indonesia saat itu.

2.1.3.1.III. Neraca Perdagangan Indonesia

Memasuki tahun 2012, neraca perdagangan Indonesia yang sedang mengalami pemulihan kembali menghadapi tekanan yang besar. Untuk pertama kalinya sejak tahun 1961, neraca perdagangan Indonesia mencatatkan defisit. Pada tahun 2012 krisis dimulai saat terjadi krisis hutang di Negara-negara Eropa. Mata uang Euro mengalami pelemahan dan surat hutang Negara-negara eropa mengalami penurunan nilai yang cukup signifikan. Hal ini menyebabkan pelemahan sektor perbankan dan keuangan. Hal ini menyebabkan harga beberapa komoditas perdagangan terkoreksi di pasar internasional. Ginting (2014) menuliskan bahwa melemahnya perekonomian internasional mendorong perlambatan laju ekspor Indonesia, harga komoditas unggulan Indonesia mengalami penurunan harga dan nilai ekspor Indonesia terkoreksi secara signifikan. Tercatat defisit saat itu mencapai US\$ 1,659 Juta, atau bergerak negatif sebanyak 106,37% dibanding periode sebelumnya, Selain itu, pada periode tersebut terjadi impor BBM dalam jumlah tinggi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri diiringi dengan pelemahan nilai tukar rupiah. Ekspor Indonesia bergerak negatif saat itu, sementara impor meningkat sebesar 8,03%. Kondisi memberikan tekanan semakin besar pada neraca perdagangan Indonesia hingga akhirnya tercatat defisit.

Selama dua dekade terakhir pertumbuhan ekspor Indonesia tercatat masih lebih kecil dari pertumbuhan impor. Ekspor Indonesia didominasi oleh barang-barang non-migas, dimana sektor industri menjadi yang paling dominan, disusul oleh tambang dan pertanian. Ekspor barang nonmigas memiliki tren yang terus meningkat sementara ekspor migas cenderung stagnan.

Pandemi COVID-19 telah mendorong pelemahan perekonomian dunia dan berakibat pada penurunan permintaan pasar (Sari, 2020). Beberapa Negara bahkan memasuki jurang resesi. Kondisi ini akan menjadi tekanan bagi performa ekspor Indonesia. Hal ini disebabkan pendapatan domestik mitra perdagangan Indonesia memiliki pengaruh positif terhadap performa ekspor Indonesia (Hapsari & Kurnia, 2018). Artinya pada saat terjadi tekanan pada perekonomian domestik mitra dagang Indonesia, permintaan akan komoditas-komoditas Indonesia akan menurun sehingga performa ekspor Indonesia melemah.

Thirafi (2020) menyatakan bahwa secara umum neraca perdagangan Indonesia cenderung berada dalam kondisi surplus meski trennya menurun. Neraca perdagangan Indonesia menunjukkan kekuatan tersendiri dalam menghadapi krisis global. Hal yang menjadi perhatian adalah lebih tingginya pertumbuhan impor Indonesia dibandingkan dengan pertumbuhan ekspor Indonesia. Selain itu Indonesia juga memiliki ketergantungan pada impor barang mentah.

2.1.3.1.IV. Strategi Penguatan Neraca Perdagangan Indonesia

Diplomasi ekonomi menjadi salah satu prioritas utama dalam kebijakan luar negeri Indonesia. Hal ini tertuang di dalam Arah kebijakan dan Strategi Renstra Kemenlu Tahun 2015-2019 yang menuliskan 8 arah kebijakan Indonesia.

Dinyatakan Sabaruddin (2016), 4 pilar diplomasi ekonomi Indonesia adalah:

1. Melakukan perluasan dan peningkatan akses pasar produk Indonesia dengan mendorong perubahan mindset para diplomat Indonesia agar lebih aktif dengan turun langsung ke lapangan;
2. Penguatan kapasitas dan sumber daya perwakilan Indonesia di pasar non tradisional atau *untapped market*;
3. Mendorong investasi asing pada sektor prioritas Indonesia dan melindungi investasi Indonesia di luar negeri;
4. Memanfaatkan *ASEAN Economic Community* (AEC).

Singkatnya, aspek penting di dalam diplomasi ekonomi Indonesia terbagi menjadi perdagangan, investasi dan pariwisata (*Trade, Tourism, Investment/ TTI*).

Tahapan dan strategi pertama dalam menjalankan diplomasi ekonomi Indonesia terutama dalam hal promosi sektor perdagangan adalah melalui economic salesmanship, yang didefinisikan oleh Rana sebagai suatu tahapan dimana negara menggunakan agen resminya (diplomat dan duta besar) dalam mempromosikan perdagangan serta investasi langsung di luar negeri. Di Indonesia, strategi economic salesmanship ini diperkuat oleh pernyataan Presiden Joko Widodo yang mengungkapkan peran diplomat Indonesia sebagai salesperson dalam mempromosikan Indonesia. Lebih lanjut, promosi dan diplomasi ekonomi yang dijalankan tidak hanya melibatkan Kementerian Luar Negeri tetapi juga instansi lainnya seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Kementerian Pariwisata, Bank Indonesia dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Pemerintah memberikan beberapa stimulus untuk mendorong sektor industri dan kegiatan ekspor-impor melalui beberapa kebijakan fiskal dan non fiskal (Silalahi & Ginting, 2020). Salah satu kebijakan yang terkait dengan performa neraca perdagangan adalah kemudahan bagi perusahaan KB (Kawasan Berikat) dan KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor). Beberapa kemudahan yang diberikan adalah izin untuk menjual barang produksinya ke dalam negeri. Bagi perusahaan KITE pemerintah bahkan tidak menerapkan PPn atau PPnBM. Hal ini bertujuan untuk memudahkan perusahaan KITE melakukan impor barang modal, dengan tujuan akhir adalah melakukan ekspor dengan lebih kompetitif.

2.1.3.2 Peningkatan Permintaan Domestik

2.1.3.2.I. Permintaan Domestik

Tertulis dalam *Deardorffs' Glossary of International Economics*, definisi Permintaan Domestik adalah Permintaan suatu produk oleh pembeli di negara sendiri (www-personal.umich.edu). *Financial Dictionary* memaknai Permintaan Domestik sebagai pengeluaran agregat dalam perekonomian yang mencakup impor tetapi tidak ekspor (indianmoney.com).

2.1.3.2.II. Kondisi Ekonomi Domestik

Kondisi ekonomi domestik Indonesia sampai dengan Triwulan III-2016 masih bertumbuh 5,02 persen (*year-on-year*), meningkat dibandingkan dengan capaian 2015. Perkiraan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2016 akan berada di sekitar 5 persen. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan dengan perkiraan awal di penghujung tahun 2015, yaitu sekitar 5,2 hingga 5,6 persen, sebagai dampak ekonomi global yang ternyata pertumbuhannya lebih rendah dari perkiraan semula (bps.go.id).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kelenturan ekonomi domestik banyak dipengaruhi oleh permintaan dari sisi domestik. Realisasi tingkat permintaan domestik tersebut masih dalam kecenderungan meningkat, sehingga dapat meminimalkan dampak menurunnya kinerja sektor eksternal.

2.1.3.2.III. Strategi Peningkatan Permintaan Domestik

Pada sisi moneter, perlu terus mengupayakan untuk memperkuat sendi-sendi perekonomian dengan menerapkan program inklusi keuangan agar masyarakat harus memiliki akses keuangan dan pembiayaan untuk membuka lebar kesempatan mereka berusaha. Kebijakan penguatan operasi moneter akan diintensifkan untuk mendukung efektivitas transmisi suku bunga dan nilai tukar. Hal ini perlu dilakukan guna memperkuat struktur dan daya dukung sistem keuangan dan lembaga keuangan dalam pembiayaan pembangunan.

Ada beberapa strategi yang telah ditetapkan dan ditempuh, yaitu:

1. Meningkatkan kedisiplinan dalam menjaga stabilitas dan kesinambungan pertumbuhan ekonomi dengan penguatan bauran kebijakan;
2. Melakukan komunikasi yang intensif untuk menjangkau persepsi pasar;
3. Meningkatkan koordinasi yang erat di antara berbagai pemangku kebijakan untuk mencapai efektivitas kebijakan dan,
4. Melakukan penguatan kebijakan struktural untuk menopang keberlanjutan pertumbuhan ekonomi, termasuk kebijakan pengelolaan subsidi BBM, kebijakan di sektor keuangan, terutama terkait pendalaman pasar keuangan, dan kebijakan di sektor riil, terutama yang terkait dengan sentra dari sisi produksi dan tata niaga bahan pangan pokok.

2.1.3.3 Produk Unggulan

Menurut Ahmadjayadi (2001), Produk Unggulan Daerah (PUD) adalah unggulan daerah yang memiliki ciri khas dan keunikan yang tidak dimiliki daerah lain serta berdaya saing handal dan dapat memberikan peluang kesempatan kerja kepada masyarakat lokal.

Produk unggulan merupakan suatu strategi pembangunan yang tidak mudah didikte oleh daerah/negara lain. Produk unggulan daerah tidaklah harus berupa hasil industri yang berteknologi canggih atau dengan investasi tinggi tetapi produk unggulan bisa dengan produk lokal yang disebut dengan *One Area Five Products* (satu daerah bisa dengan lima produk unggulan) Hal tersebut sesuai dengan surat dari Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah pada tahun 1998 dan 1999. Inti daripada surat tersebut adalah bahwa kabupaten/kota dapat menghasilkan 5 PUD yang disahkan oleh kepala daerah (Ahmadjayadi, 2001).

2.1.3.3.I. Komoditas Unggulan

Sebagai perbandingan, komoditas unggulan akan lebih mudah dan lebih rasional untuk dikembangkan jika memandang komoditas unggulan dari kebutuhan pasar. Dilihat dari sisi positif, jika mengelompokkan komoditas unggulan berdasarkan potensi pasarnya, mengingat ukuran keberhasilan komoditas unggulan dapat diukur dari perannya dalam memberikan nilai tambah bagi pelaku usaha. Selain itu, memberikan kontribusi dalam pengembangan struktur ekonomi dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Adapun pengelompokan komoditas tersebut, dapat disusun sebagai berikut :

1. Komoditas unggulan pasar ekspor: komoditas yang telah mampu memenuhi persyaratan perdagangan di pasar ekspor. Ini menyangkut aspek keamanan, kesehatan, standard, dan jumlah yang memadai, sehingga komoditas tersebut diminati negara pengimpor.
2. Komoditas unggulan pasar tradisional: komoditas yang mampu memenuhi keinginan selera konsumen lokal, baik dari aspek cita rasa, bentuk, ukuran, kualitas harga, dan budaya lokal.
3. Komoditas unggulan pasar modern: komoditas yang telah memiliki daya saing tinggi dari aspek harga, kualitas, kuantitas, dan kontinuitas, serta biasa dibutuhkan oleh berbagai kalangan konsumen secara internasional.
4. Komoditas unggulan pasar industri: komoditas yang merupakan bahan baku utama industri manufaktur.
5. Komoditas unggulan pasar antar pulau: komoditas yang dibutuhkan oleh pasar antar pulau karena komoditas tersebut tak mampu diproduksi di pulau tersebut.

6. Komoditas unggulan pasar khusus: komoditas yang memang dipesan oleh pasar tertentu lengkap dengan spesifikasinya.

Menurut Ambardi & Socia (2002), kriteria komoditas unggulan suatu daerah, diantaranya:

1. Komoditas unggulan harus mampu menjadi penggerak utama pembangunan perekonomian. Artinya, komoditas unggulan dapat memberikan kontribusi yang signifikan pada peningkatan produksi, pendapatan, maupun pengeluaran.
2. Komoditas unggulan mempunyai keterkaitan ke depan dan ke belakang yang kuat, baik sesama komoditas unggulan maupun komoditas lainnya.
3. Komoditas unggulan mampu bersaing dengan produk sejenis dari wilayah lain di pasar nasional dan pasar internasional, baik dalam harga produk, biaya produksi, kualitas pelayanan, maupun aspek-aspek lainnya.
4. Komoditas unggulan daerah memiliki keterkaitan dengan daerah lain, baik dalam hal pasar konsumen) maupun pemasokan bahan baku (jika bahan baku di daerah sendiri tidak mencukupi atau tidak tersedia sama sekali).
5. Komoditas unggulan memiliki status teknologi yang terus meningkat, terutama melalui inovasi teknologi.
6. Komoditas unggulan mampu menyerap tenaga kerja berkualitas secara optimal sesuai dengan skala produksinya.
7. Komoditas unggulan bisa bertahan dalam jangka waktu tertentu, mulai dari fase kelahiran, pertumbuhan, puncak hingga penurunan. Di saat komoditas unggulan yang satu memasuki tahap penurunan, maka komoditas unggulan lainnya harus mampu menggantikannya.
8. Komoditas unggulan tidak rentan terhadap gejolak eksternal dan internal.

Pengembangan komoditas unggulan harus mendapatkan berbagai bentuk dukungan. Misalnya, dukungan keamanan, sosial, budaya, informasi dan peluang pasar, kelembagaan, fasilitas insentif/disinsentif, dan lain-lain.

2.1.3.3.II. Kriteria Produk Unggulan

Terdapat beberapa kriteria yang digunakan untuk menentukan apakah suatu komoditas tergolong unggul atau tidak bagi suatu wilayah. Kriteria-kriteria tersebut, adalah (Alkadri *et al.*, 2001) :

1. Harus mampu menjadi penggerak utama (*prime mover*) pembangunan perekonomian,
2. Mempunyai keterkaitan ke depan dan ke belakang kuat baik sesama komoditas unggulan maupun komoditas lainnya,

3. Mampu bersaing dengan produk/komoditas sejenis dari wilayah lain di pasar nasional maupun internasional baik dalam hal harga produk, biaya produksi, maupun kualitas pelayanan,
4. Memiliki keterkaitan dengan wilayah lain baik dalam hal pasar maupun pasokan bahan baku,
5. Memiliki status teknologi yang terus meningkat,
6. Mampu menyerap tenaga kerja berkualitas secara optimal sesuai dengan skala produksinya,
7. Dapat bertahan dalam jangka panjang tertentu,
8. Tidak rentan terhadap gejolak eksternal dan internal,
9. Pengembangannya harus mendapatkan berbagai bentuk dukungan (keamanan, sosial, budaya, informasi dan peluang pasar, kelembagaan, fasilitas insentif/disinsentif, dan lainnya, dan

Pengembangannya berorientasi pada kelestarian sumberdaya dan lingkungan

2.1.3.4 Investasi

Secara umum, Tendelilin (2001) mendefinisikan investasi sebagai suatu komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan dimasa datang. Menurut Samuelson (2011), investasi meliputi penambahan stok modal atau barang disuatu negara, seperti bangunan peralatan produksi, dan barang-barang inventaris dalam waktu satu tahun.

Istilah investasi bisa berkaitan dengan berbagai macam aktivitas. Menginvestasikan dana pada sektor riil (tanah, emas, mesin atau bangunan) maupun asset finansial (deposito, saham atau obligasi), merupakan aktifitas yang umum dilakukan. Menurut Jogiyanto, investasi dapat didefinisikan sebagai penundaan konsumsi sekarang untuk digunakan dalam produksi yang efisien selama periode waktu tertentu (Jogiyanto, 2003).

Sedangkan menurut menurut Sukirno (2009) kegiatan investasi yang dilakukan oleh masyarakat secara terus menerus akan meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Menurut Nizar *et.al*, (2013), Peranan ini bersumber dari tiga fungsi penting dari kegiatan investasi, yakni:

1. Investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat, sehingga kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat, pendapatan nasional serta kesempatan kerja;

2. Pertambahan barang modal sebagai akibat investasi akan menambah kapasitas produksi;
3. Investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi.

Investasi adalah penggunaan sumber untuk peralatan, bangunan dan persediaan. Uang yang dikeluarkan untuk investasi baru tersebut akan memberikan pengaruh yang besar terhadap perekonomian (Swasta, 2000: 20).

Investasi proyek adalah upaya menanamkan faktor produk langka pada proyek tertentu (baru atau perluasan) pada lokasi tertentu, dalam jangka menengah atau panjang (Sutojo, 2000:1).

Dari segi nilai dan proporsinya terhadap pendapatan nasional, investasi perusahaan tidaklah sebesar pengeluaran konsumsi rumah tangga, namun peranan investasi perusahaan lebih penting. Di berbagai negara-negara industri yang perekonomiannya sudah sangat berkembang, investasi perusahaan adalah sangat “*volatile*” yaitu selalu mengalami kenaikan dan penurunan yang sangat besar, dan sebagai sumber penting dari berlakunya fluktuasi dalam kegiatan perekonomian.

Disamping itu kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat.

2.1.3.4.I. Investasi Menurut Teori Ekonomi

Beberapa teori mengenai investasi adalah:

1. Teori Neo Klasik

Klasik menekankan pentingnya tabungan sebagai sumber investasi. Investasi dipandang sebagai salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Makin cepat perkembangan investasi ketimbang laju pertumbuhan penduduk, makin cepat perkembangan volume stok kapital rata-rata per tenaga kerja. Makin tinggi rasio kapital per tenaga kerja cenderung makin tinggi kapasitas produksi per tenaga kerja. Tokoh Neo Klasik, Sollow dan Swan memusatkan perhatiannya pada bagaimana pertumbuhan penduduk, akumulasi capital, kemajuan teknologi dan output saling berinteraksi dalam proses pertumbuhan ekonomi (Arsyad, 2010).

2. Teori Harrod-Domar

Model ini dikembangkan secara independen oleh Roy F. Harrod (1939) dan Evsey Domar (1946). Harrod-Domar mempertahankan pendapat dari para ahli ekonomi sebelumnya yang merupakan gabungan dari pendapat kaum klasik dan Keynes, beliau menekankan peranan pertumbuhan modal dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi. Teori Harrod-Domar memandang bahwa pembentukan modal dianggap sebagai pengeluaran yang akan menambah kemampuan suatu

perekonomian untuk menghasilkan barang dan atau jasa, maupun sebagai pengeluaran yang akan menambah permintaan efektif seluruh masyarakat. Dimana apabila pada suatu masa tertentu dilakukan sejumlah pembentukan modal, maka pada masa berikutnya perekonomian tersebut mempunyai kemampuan untuk menghasilkan barang-barang dan jasa yang lebih besar (Sukirno, 2009).

Berdasarkan jenisnya investasi dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

1. Investasi Pemerintah,
Investasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pada umumnya investasi yang dilakukan oleh pemerintah tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
2. Investasi Swasta,
Investasi yang dilakukan oleh sektor swasta nasional yaitu Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) ataupun investasi yang dilakukan oleh swasta asing atau disebut Penanaman Modal Asing (PMA). Investasi yang dilakukan swasta bertujuan untuk mencari keuntungan dan memperoleh pendapatan serta didorong oleh adanya pertambahan pendapatan. Jika pendapatan bertambah konsumsipun bertambah dan bertambah pula effective demand. Investasi timbul diakibatkan oleh bertambahnya permintaan yang sumbernya terletak pada penambahan pendapatan disebut induced investment.

Menurut UU No.25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Penanaman Modal terbagi menjadi dua bagian, yaitu penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing. Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri, Sedangkan Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanaman modal dalam negeri.

Dana investasi swasta menurut asalnya terdiri dari dua 2 macam, yaitu: PMA (Penanaman Modal Asing), jenis investasi yang sumber modalnya berasal dari luar negeri, sedangkan PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) ialah jenis investasi yang sumber modalnya berasal dari dalam negeri. Penanaman Modal Asing (PMA) adalah salah satu upaya untuk meningkatkan jumlah modal untuk pembangunan ekonomi yang bersumber dari luar negeri. Salvatore (2014) menjelaskan bahwa PMA terdiri atas:

1. Investasi portofolio (*Portfolio Investment*)

Investasi yang melibatkan hanya aset-aset finansial saja, seperti obligasi dan saham, yang didenominasikan atau ternilai dalam mata uang nasional. Kegiatan-kegiatan investasi portofolio atau finansial ini biasanya berlangsung melalui lembaga-lembaga keuangan seperti bank, perusahaan dana investasi, yayasan pensiun, dan sebagainya.

2. Investasi asing langsung (*Foreign Direct Investment*)

Merupakan PMA yang meliputi investasi ke dalam aset-aset secara nyata berupa pembangunan pabrik-pabrik, pengadaan berbagai macam barang modal, pembelian tanah untuk keperluan produksi, dan sebagainya. Wiranata (2009) berpendapat bahwa investasi asing secara langsung dapat dianggap sebagai salah satu sumber modal pembangunan ekonomi yang penting. Semua negara yang menganut sistem ekonomi terbuka, pada umumnya memerlukan investasi asing, terutama perusahaan yang menghasilkan barang dan jasa untuk kepentingan ekspor. Di negara maju seperti Amerika, modal asing (khususnya dari Jepang dan Eropa Barat) tetap dibutuhkan guna memacu pertumbuhan ekonomi domestik, menghindari kelesuan pasar dan penciptaan kesempatan kerja. Apalagi di negara berkembang seperti Indonesia, modal asing sangat diperlukan terutama sebagai akibat dari modal dalam negeri yang tidak mencukupi. Untuk itu berbagai kebijakan di bidang penanaman modal perlu diciptakan dalam upaya menarik pihak luar negeri untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Menurut Harjono (2008) penanaman modal dalam negeri adalah penggunaan modal oleh negara maupun swasta nasional atau swasta asing yang berdomisili di Indonesia yang digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha bagi usaha-usaha yang mendorong pembangunan ekonomi pada umumnya.

2.1.3.4.II. Jenis-Jenis Investasi

Menurut Isnawan (2012), jenis investasi dikategorikan berdasarkan jangka waktu, risiko dan prosesnya dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Menurut jangka waktunya
 - a) Investasi jangka pendek, yaitu investasi yang dilakukan tidak lebih dari 12 bulan.
 - b) Investasi jangka menengah, yaitu investasi yang memiliki rentang waktu antara 1 hingga 5 tahun.
 - c) Investasi jangka panjang.
2. Menurut risiko

Setiap pilihan investasi akan berkaitan dengan dua hal, risiko dan return. Keduanya merupakan hubungan sebab dan akibat dan hubungan yang saling kontradiktif. Dalam teori investasi di kenal istilah “*high risk high return, low risk low return*”.

Menurut Samuelson (2011), investasi meliputi penambahan stok modal atau barang disuatu negara, seperti bangunan peralatan produksi, dan barang-barang inventaris dalam waktu satu tahun. Investasi merupakan langkah mengorbankan konsumsi di waktu mendatang.

Secara statistik, investasi atau pengeluaran untuk membeli barangbarang modal dan peralatan produksi, dibedakan menjadi 4 komponen, yaitu: investasi perusahaan-perusahaan swasta, pengeluaran untuk mendirikan tempat tinggal, perubahan dalam inventaris (inventory) perusahaan dan investasi yang dilakukan oleh pemerintah. Tujuan pengusaha untuk mewujudkan alat-alat produksi tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan dari kegiatan produksi yang dilakukannya di masa depan. Hal ini berarti investasi yang dilakukan di masa kini sangat erat hubungannya dengan prospek memperoleh untung di masa depan. Semakin cerah prospek untuk memperoleh keuntungan yang lumayan di masa depan, semakin tinggi investasi yang dilakukannya pada masa kini.

Peranan ini bersumber dari tiga fungsi penting kegiatan investasi dalam perekonomian:

1. Investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat, sehingga kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat dan pendapatan nasional.
2. Pertambahan barang modal sebagai akibat investasi akan menambahkan kapasitas memproduksi di masa depan dan perkembangan ini akan menstimulir pertumbuhan produksi nasional serta kesempatan kerja.
3. Investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi, perkembangan ini akan memberi sumbangan penting terhadap peningkatan produktivitas dan pendapatan per kapita masyarakat (Sasana, 2008).

2.1.3.5 Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan

2.1.3.5.I. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi adalah kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu wilayah untuk menyediakan semakin banyak barang-barang ekonomi kepada penduduknya, kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi, dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukan (Jhingan, 2007:57).

Menurut Sukirno (2000) pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Tekanannya adalah pada tiga aspek, yaitu: proses, output per kapita, dan jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi adalah “proses”, bukan gambaran ekonomi sesaat. Pembangunan daerah dan pembangunan sektoral perlu selalu dilaksanakan dengan selaras, sehingga pembangunan sektoral yang berlangsung didaerah-daerah, benar-benar dengan potensi dan prioritas daerah. Untuk keseluruhan pembangunan, daerah juga benar-benar merupakan satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan didalam mewujudkan tujuan nasional.

Menurut Sukirno (2002:10) Pertumbuhan Ekonomi berarti perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat, dari satu periode ke periode lainnya kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat. Kemampuan yang meningkat ini disebabkan karena faktor-faktor produksi akan selalu mengalami penambahan dalam jumlah dan kualitasnya.

Menurut Adisasmita (2013), pertumbuhan ekonomi merupakan upaya peningkatan kapasitas produksi untuk mencapai penambahan *output*, yang diukur menggunakan PDB maupun PDRB dalam suatu wilayah.

Menurut Todaro (2000:140) ada tiga faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu masyarakat:

1. Akumulasi modal

Termasuk investasi baru yang berwujud tanah, peralatan dan sumber daya manusia. Hal ini akan terjadi apabila bagian dan pendapatan sekarang akan ditabung dan kemudian diinvestasikan untuk memperbesar output pada masa yang akan datang.

2. Pertumbuhan Penduduk

Berhubungan dengan kenaikan angka kenaikan kerja secara tradisional dianggap sebagai faktor yang positif dalam merangsang pertumbuhan ekonomi, artinya semakin banyak angkatan kerja maka semakin banyak faktor produksi tenaga kerja, sedangkan semakin banyak penduduk akan meningkatkan pasar domestiknya.

3. Kemajuan Teknologi

Kemajuan yang disebabkan oleh cara-cara baru dan lama yang diperbaiki dalam melakukan pekerjaan tradisional seperti: cara menanam padi, membuat pakaian dan sebagainya. Dengan klasifikasi kemajuan teknologi tersebut yaitu hemat tenaga kerja dan hemat modal.

2.1.3.5.II. Pertumbuhan Ekonomi Wilayah

Pertumbuhan ekonomi wilayah adalah penambahan pendapatan masyarakat secara keseluruhan yang terjadi di wilayah tersebut, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah added value yang terjadi. Pendapatan wilayah menggambarkan balas jasa bagi faktor-faktor produksi yang beroperasi di daerah tersebut (tanah, modal, tenaga kerja, dan teknologi), yang berarti secara kasar dapat menggambarkan kemakmuran daerah tersebut. Kemakmuran suatu wilayah selain ditentukan oleh besarnya nilai tambah yang tercipta di wilayah tersebut juga oleh seberapa besar terjadi *transfer-payment*, yaitu bagian pendapatan yang mengalir ke luar wilayah atau mendapat aliran dana dari luar wilayah (Adisasmita, 2005).

2.1.3.5.III. Pengukuran Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah sebagian dari perkembangan kesejahteraan masyarakat yang diukur dengan besarnya pertumbuhan domestik regional bruto (PDRB) perkapita (Zaris, 1987). Tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan dengan tingginya nilai PDRB menunjukkan bahwa daerah tersebut mengalami kemajuan dalam perekonomian.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut Badan Pusat Statistik (BPS) didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. Produk

Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada setiap tahun, sedang Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu.

Produk domestik regional bruto atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun (Sukirno, 2009:56), sedangkan menurut BPS Produk domestik regional bruto atas dasar harga berlaku digunakan untuk menunjukkan besarnya struktur perekonomian dan peranan sektor ekonomi. Untuk lebih jelas dalam menghitung angka-angka produk domestik regional bruto ada tiga pendekatan yang cukup kerap digunakan dalam melakukan suatu penelitian.

Yang pertama, menurut pendekatan produksi. dalam pendekatan produksi, produk domestik regional bruto adalah menghitung nilai tambah dari barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu kegiatan ekonomi di daerah tersebut dikurangi biaya antara masing-masing total produksi bruto tiap kegiatan subsektor atau sektor dalam jangka waktu tertentu. Nilai tambah merupakan selisih antara nilai produksi dan

nilai biaya antara yaitu bahan baku/penolong dari luar yang dipakai dalam proses produksi (Tarigan, 2005).

Yang kedua, menurut pendekatan Pendapatan. Dalam pendekatan pendapatan, nilai tambah dari setiap kegiatan ekonomi diperkirakan dengan menjumlahkan semua balas jasa yang diterima faktor produksi, yaitu upah dan gaji dan surplus usaha, penyusutan, dan pajak tidak langsung neto. Pada sektor pemerintahan dan usaha yang sifatnya tidak mencari untung, surplus usaha tidak diperhitungkan. Surplus usaha meliputi bunga yang dibayarkan neto, sewa tanah, dan keuntungan. Metode pendekatan pendapatan banyak dipakai pada sektor jasa, tetapi tidak dibayar setara harga pasar, misalnya sektor pemerintahan. Hal ini disebabkan kurang lengkapnya data dan tidak adanya metode yang akurat yang dapat dipakai dalam mengukur nilai produksi dan biaya antara dari berbagai kegiatan jasa, terutama kegiatan yang tidak mengutip biaya (Ibid, 2005). Ketiga yaitu, menurut pendekatan pengeluaran. Pendekatan dari segi pengeluaran adalah menjumlahkan nilai penggunaan akhir dari barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri. Jika dilihat dari segi penggunaan maka total penyediaan/produksi barang dan jasa itu digunakan untuk konsumsi rumah tangga, konsumsi lembaga swasta yang tidak mencari untung, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto (investasi), perubahan stok dan ekspor neto.

Cara penyajian produk domestik regional bruto disusun dalam dua bentuk, yaitu :

1. Produk domestik regional bruto atas dasar harga konstan.

Menurut BPS pengertian Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan yaitu jumlah nilai produksi atau pengeluaran atau pendapatan yang dihitung menurut harga tetap. Dengan cara menilai kembali atau mendefinisikan berdasarkan harga-harga pada tingkat dasar dengan menggunakan indeks harga konsumen. Dari perhitungan ini tercermin tingkat kegiatan ekonomi yang sebenarnya melalui Produk Domestik Regional Bruto riilnya.

2. Produk domestik regional bruto atas dasar harga berlaku

Pengertian Produk domestik regional bruto atas dasar harga berlaku menurut BPS adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Yang dimaksud nilai tambah yaitu merupakan nilai yang ditambahkan kepada barang dan jasa yang dipakai oleh unit produksi dalam proses produksi sebagai input antara. Nilai yang ditambahkan ini sama dengan balas jasa atas ikut sertanya faktor produksi dalam proses produksi.

Adapun manfaat penghitungan nilai PDRB yaitu, mengetahui dan menelaah struktur atau susunan perekonomian. Dari perhitungan PDRB dapat diketahui apakah suatu daerah termasuk daerah industri, pertanian atau jasa dan berapakah besar sumbangan masing-masing sektornya dan membandingkan perekonomian dari waktu ke waktu. Oleh karena nilai PDRB dicatat tiap tahun, maka akan di dapat catatan angka dari tahun ke tahun. Dengan demikian diharapkan dapat diperoleh keterangan kenaikan atau penurunan apakah ada perubahan atau pengurangan kemakmuran material atau tidak.

2.1.3.5.IV. Pembangunan Daerah

Konsep dasar pembangunan daerah adalah proses pengarahan dan pengendalian dalam upaya pemanfaatan sumberdaya daerah berdasarkan kebutuhan dan kemampuan melalui kebijakan dan strategis terpadu secara internal dan eksternal. Proses pengarahan yaitu mengidentifikasi potensi dan merencanakan pemanfaatannya berdasarkan analisis kelayakan teknis, ekonomis dan sosial. Proses pengarahan yaitu menggerakkan lembaga-lembaga yang terlibat dalam upaya pemanfaatan sumberdaya melalui aliansi strategis (*strategic alliance*), kerjasama dan kemitraan *partnership*. Proses pengendalian yaitu memantau dan mengevaluasi untuk member umpan balik bagi penyempurnaan. (Kuncoro, 2004)

Menurut Sanusi (1987), pembangunan daerah dilaksanakan agar ketimpangan pertumbuhan ekonomi antar daerah tidak semakin meluas, tujuan pembangunan yang sedang dilaksanakan mencakup sasaran seperti :

1. Dalam usaha meratakan pembangunan diseluruh daerah, sekaligus untuk menghindarti terjadinya jurang perbedaan tingkat pembangunan antar daerah yang semakin dalam.
2. Pengarahan dalam kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan kemampuan aspirasi dan potensi yang terdapat didaerah, baik bagi kepentingan perkembangan nasional maupun bagi kepentingan daerah itu sendiri.
3. Mengembangkan hubungan ekonomi antar daerah yang saling menguntungkan agar terjalin ikatan-ikatan (ekonomi) antar daerah yang kuat didalam satu rangka kesatuan ekonomi nasional yang kokoh.
4. Membina daerah-daerah minus, daerah perbatasan, dan tanah-tanah kritis, dengan program-program khusus.

Pembangunan daerah dilaksanakan untuk mencapai tiga tujuan penting, yaitu mencapai pertumbuhan (*growth*), pemerataan (*equity*), dan keberlanjutan (*sustainability*).

1. Pertumbuhan (*growth*), tujuan yang pertama adalah pertumbuhan ditentukan sampai dimana kelangkaan sumber daya dapat terjadi atas sumber daya

manusia, peralatan, dan sumber daya alam dapat dialokasikan secara maksimal dan dimanfaatkan untuk meningkatkan kegiatan produktif.

2. Pemerataan (*equity*), dalam hal ini mempunyai implikasi dalam pencapaian pada tujuan yang ketiga, sumber daya dapat berkelanjutan maka tidak boleh terfokus hanya pada satu daerah saja sehingga manfaat

Pembangunan ekonomi daerah pada umumnya didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu daerah meningkat dalam jangka panjang (Arsyad, 2010). Menurut Blakely (1989), pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat mengelola berbagai sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan untuk menciptakan suatu lapangan pekerjaan baru dan merangsang pertumbuhan ekonomi dalam wilayah tersebut.

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses yang mencakup pembentukan institusi-institusi baru, pembangunan industri-industri alternatif, perbaikan kapasitas kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, alih ilmu pengetahuan dan pengembangan perusahaan-perusahaan baru. Dimana, kesemuanya ini mempunyai tujuan utama yaitu untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah (Arsyad, 2010).

Pembangunan ekonomi oleh beberapa ekonom dibedakan pengertiannya dengan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi diartikan sebagai :

1. Peningkatan pendapatan per kapita masyarakat, yaitu tingkat pertambahan PDRB/GNP pada suatu tingkat tertentu adalah melebihi tingkat pertambahan penduduk.
2. Perkembangan PDRB/GNP yang berlakudalam suatu daerah/negara diikuti oleh perombakan dan modernisasi struktur ekonominya.

Dua kondisi yang mempengaruhi proses perencanaan pembangunan daerah adalah:

1. Tekanan yang berasal dari lingkungan dalam negeri maupun luar negeri yang mempengaruhi kebutuhan daerah dalam proses pembangunan perekonomiannya.
2. Kenyataan bahwa perekonomian daerah dalam suatu negara dipengaruhi oleh setiap sektor secara berbeda-beda (Kuncoro, 2004).

2.1.3.5.V. Kebijakan Mempercepat Pembangunan

Di bawah ini merupakan kebijakan-kebijakan yang bisa diterapkan pemerintah untuk mempercepat proses pembangunan ekonomi, diantaranya yaitu (Sukirno, 2015):

1. **Kebijakan Diversifikasi Kegiatan Ekonomi**
Biasanya negara dengan produktivitas yang rendah memiliki tingkat pendapatan masyarakat yang rendah, dengan demikian negara perlu melakukan diversifikasi dengan cara melakukan pembaharuan pada kegiatan ekonomi yang masih tradisional kearah yang lebih modern, serta mengembangkan kegiatan ekonomi yang baru yang dapat mempercepat transformasi kegiatan perekonomian kearah yang modern.
2. **Mengembangkan Infrastruktur**
Modernisasi ekonomi juga harus didukung dengan infrastruktur yang modern pula, karena kegiatan perekonomian memerlukan infrastruktur untuk berkembang, seperti jalan, jembatan, pelabuhan laut, bandara, kawasan irigasi, penyediaan air, listrik, jalur telekomunikasi, kawasan industri, dan sebagainya yang mana akan diperlukan perusahaan-perusahaan untuk meningkatkan efisiensinya.
3. **Meningkatkan tabungan dan Investasi**
Rendahnya pendapatan masyarakat menyebabkan rendahnya nilai tabungan yang dimiliki masyarakat, sedangkan pembangunan memerlukan tabungan yang besar untuk membiayai investasi yang dilakukan, kekurangan investasi ini juga menjadi penghambat pembangunan ekonomi, dalam hal ini langkah yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah dengan menarik investor luar negeri untuk bekerjasama dibidang investasi sehingga bisa digunakan untuk kegiatan pembangunan.
4. **Meningkatkan taraf pendidikan masyarakat**
Pendidikan merupakan hal penting dalam pembangunan ekonomi karena dengan pendidikan akan meningkatkan pengetahuan, pengalaman, ilmu serta keahlian masyarakat, sehingga bisa ikut berperan dalam pembangunan.
5. **Mengembangkan Institusi yang mendorong pembangunan**
Pembangunan ekonomi harus diimbangi pula dengan pengembangan intitusi yang bisa berperan untuk mempercepat atau mendukung proses pembangunan, seperti institusi keuangan, pendidikan, administrasi pemerintah daan lain sebagainya.
6. **Merumuskan dan melaksanakan perencanaan ekonomi**
Pada tahap permulaan proses pembangunan ekonomi, perencanaan pembangunan harus dirumuskan, sehingga dari perencanaan tersebut bisa dilakukan penyelarasan dengan program jangka panjang, sejauh mana investasi swasta dan pemerintah perlu dilakukan, jumlah pembelanjaan dan sumber keuangan yang digunakan, dan lain sebagainya.

2.1.3.6 Transformasi Struktural

Teori-teori perubahan struktural (*structural change theory*) memusatkan perhatiannya pada mekanisme yang akan memungkinkan negara-negara terbelakang untuk mentransformasikan struktur perekonomian dalam negeri mereka dari perekonomian pertanian subsisten tradisional yang hanya mampu mencukupi keperluan sendiri ke perekonomian yang lebih modern, lebih berorientasi ke kehidupan perkotaan, dan lebih bervariasi, serta memiliki sektor industri manufaktur dan jasa-jasa yang tangguh (Todaro, 2000).

2.1.3.6.I. Teori Perubahan Struktural

Teori Lewis membahas proses pembangunan di negara-negara Dunia Ketiga yang mengalami kelebihan penawaran tenaga kerja. Menurut model yang diajukan oleh Lewis, perekonomian yang terbelakang terdiri dari dua sektor :

1. Sektor tradisional, yaitu sektor pedesaan subsisten yang kelebihan penduduk dan ditandai dengan produktivitas marjinal tenaga kerja sama dengan nol. Ini merupakan situasi yang memungkinkan Lewis untuk mendefinisikan kondisi “surplus” tenaga kerja sebagai suatu fakta bahwa sebagian tenaga kerja tersebut ditarik dari sektor pertanian dan sektor itu tidak akan kehilangan outputnya sedikit pun.
2. Sektor industri perkotaan modern yang tingkat produktivitasnya tinggi dan menjadi tempat penampungan tenaga kerja yang ditransfer sedikit demi sedikit dari sektor subsisten.

Perhatian utama dari model Lewis ini diarahkan pada terjadinya proses pengalihan tenaga kerja di sektor yang modern. Pengalihan tenaga kerja dan pertumbuhan kesempatan kerja tersebut dimungkinkan oleh adanya perluasan output pada sektor modern tersebut.

Teori Chenery mengidentifikasi karakteristik-karakteristik yang sekiranya berpengaruh besar terhadap keberhasilan proses pembangunan. Faktor-faktor yang didapatinya penting antara lain adalah kelancaran transisi dari perekonomian agraris ke perekonomian industri; kesinambungan akumulasi modal fisik dan manusia; perubahan jenis permintaan konsumen dari produk kebutuhan pokok ke berbagai macam barang dan jasa; perkembangan daerah perkotaan terutama pusat-pusat industri berkat migrasi para pencari kerja dari daerah-daerah pertanian di pedesaan dan kota-kota kecil; serta pengurangan jumlah anggota dalam setiap keluarga dan kenaikan populasi pada umumnya (Todaro, 2000).

Analisis teori *Pattern of Development* menjelaskan perubahan struktur dalam tahapan proses perubahan ekonomi dari negara berkembang yang mengalami transformasi dari pertanian tradisional beralih ke sektor industri sebagai mesin

utama pertumbuhan ekonomi. Peningkatan peran sektor industri dalam perekonomian sejalan dengan peningkatan pendapatan perkapita yang berhubungan sangat erat dengan akumulasi capital dan peningkatan sumber daya (human capital).

1. Dilihat dari Permintaan Domestik

Apabila dilihat dari permintaan domestik akan terjadi penurunan permintaan terhadap konsumsi bahan makanan karena dikompensasikan oleh peningkatan permintaan terhadap barang-barang non kebutuhan pangan, peningkatan investasi, dan peningkatan anggaran belanja pemerintah yang mengalami peningkatan dalam struktur GNP yang ada. Di sektor perdagangan internasional terjadi juga perubahan yaitu peningkatan nilai ekspor dan impor. Sepanjang perubahan struktural ini berlangsung terjadi peningkatan pangsa ekspor komoditas hasil produksi sektor industri dan penurunan pangsa sektor yang sama pada sisi impor.

2. Dilihat dari Tenaga Kerja

Apabila dilihat dari sisi tenaga kerja ini akan terjadi proses perpindahan tenaga kerja dari sektor pertanian di desa menuju sektor industri di perkotaan, meski pergeseran ini masih tertinggal (lag) dibandingkan proses perubahan struktural itu sendiri. Dengan keberadaan lag inilah maka sektor pertanian akan berperan penting dalam peningkatan penyediaan tenaga kerja, baik dari awal maupun akhir dari proses transformasi perubahan struktural tersebut.

Secara umum negara-negara yang memiliki tingkat populasi tinggi yang pada dasarnya menggambarkan tingkat permintaan potensial yang tinggi, cenderung untuk mendirikan industri yang bersifat substitusi impor. Artinya mereka memproduksi sendiri barang-barang yang dulunya impor untuk kemudian dijual di pasaran dalam negeri. Sebaliknya negara-negara dengan jumlah penduduk yang relatif kecil, cenderung akan mengembangkan industri yang berorientasi ke pasar internasional. Teori perubahan struktural menjelaskan bahwa percepatan dan pola transformasi struktural yang terdaji pada suatu negara dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal yang saling berkaitan satu dengan yang lain.

Dari pengamatan Chenery dan Syrquin di peroleh pola yang sistematis bahwa dalam tahap awal pembangunan ekonomi sektor pertanian sangat menonjol, kemudian dengan semakin tingginya Produk Nasional Bruto (PNB) peran pertanian akan semakin menurun. Sedangkan pangsa industri dan jasa-jasa semakin meningkat, landasan dari terjadinya perubahan dengan arah seperti di atas diawali dengan kesenjangan produktivitas marginal dari sumber daya yang dipakai di sektor pertanian dan industri (Sirojuzilam dan Mahalli, 2011).

Teori Fei-Ranis berkenaan dengan suatu negara terbelakang yang kelebihan buruh disertai perekonomian yang miskin sumberdaya, di mana sebagian besar

penduduk bergerak di bidang pertanian di tengah pengangguran hebat dan tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi. Ekonomi pertaniannya mandeg. Kebanyakan orang bergerak di lapangan pertanian tradisional. Bidang-bidang nonpertanian memang ada, tetapi tidak begitu banyak mempergunakan modal. Disitu juga ada sektor industri yang aktif dan dinamis. Pembangunan terdiri dari pengalokasian kembali surplus tenaga kerja di bidang pertanian, yang sumbangannya terhadap output adalah nol atau dapat diabaikan, ke sektor industri dimana mereka menjadi produktif dengan upah yang sama dengan upah di bidang pertanian.

Di dalam mengemukakan teori pembangunan ekonominya, Fei dan Ranis membuat asumsi berikut:

1. Ada ekonomi dua muka yang terbagi dalam sektor pertanian tradisional yang terhenti dan sektor industri yang aktif.
2. Output sektor pertanian adalah fungsi dari tanah dan buruh saja.
3. Di sektor pertanian tidak ada akumulasi modal selain dalam bentuk penggarapan tanah kembali (reklamasi).
4. Persediaan atau penawaran tanah bersifat tetap.
5. Kegiatan pertanian ditandai dengan hasil (*return to scale*) yang tetap dengan buruh sebagai faktor variabel.
6. Diasumsikan bahwa produktivitas marginal buruh adalah nol. Jika penduduk melampaui jumlah di mana produktivitas marginal buruhnya nol, buruh dapat dialihkan ke sektor industri tanpa mengurangi (*output*) pertanian.
7. Output sektor industri adalah fungsi dari modal dan buruh saja. Tanah tidak mempunyai peranan sebagai faktor produksi.
8. Pertumbuhan penduduk dianggap sebagai fenomena eksogen.
9. Upah nyata di sektor industri dianggap tetap dan sama dengan tingkat pendapatan nyata (sebelumnya) sektor pertanian. Mereka menyebutnya upah institusional.
10. Pekerja di masing-masing sektor hanya mengkonsumsi produk-produk pertanian.

Berdasarkan asumsi ini, Fei dan Ranis menelaah pembangunan ekonomi surplus-buruh menjadi tiga tahap. Pada tahap pertama, para penganggur tersamar, yang tidak menambah output pertanian, dialihkan ke sektor industri dengan upah institusional yang sama. Pada tahap kedua, pekerja pertanian menambah keluaran pertanian tetapi memproduksi lebih kecil dari pada upah institusional yang mereka peroleh. Para pekerja semacam ini juga dialihkan ke sektor industri. Jika migrasi para pekerja ini berlangsung terus, akan dicapai suatu titik di mana pekerja pertanian menghasilkan output yang sama dengan upah institusional. Ini mengawali tahap ketiga yang menandai akhir tahap tinggal landas dan awal pertumbuhan swasembada

pada saat buruh pertanian menghasilkan lebih besar daripada perolehan upah institusional. Di dalam tahap ini kelebihan buruh sudah terserap dan sektor pertanian berangkat menjadi komersial (Jhingan, 2008).

2.2 Penelitian Terdahulu

2.2.1 Produk Unggulan terhadap Penguatan Neraca Perdagangan

Pada penelitian Cornot-Gandolphe (2017) yang menganalisis bagaimana Indonesia berencana untuk mencapai keseimbangan ini dan apa yang bisa menjadi implikasi dari meningkatnya permintaan batubara domestik terhadap ekspor batubara Indonesia, ditemukan bahwa batubara memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PDB Indonesia (diperkirakan sekitar 4 persen) dan pembangunan ekonomi daerah terpencil di mana operasi pertambangan berada.

2.2.2. Produk Unggulan terhadap Peningkatan Permintaan Domestik

Pada penelitian Godoy & Bennett (1990) yang mengkaji sistem pemasaran cengkeh, faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas cengkeh, dan sistem kualitas premium dan penalti yang diterapkan dalam pemasaran cengkeh di Indonesia, ditemukan bahwa karena kompetitifitas pasar domestik, perusahaan rokok kretek besar menjadi pembeli terbesar cengkeh berkualitas tinggi, sementara cengkeh dengan kualitas yang lebih rendah dibeli oleh produsen kretek yang lebih kecil.

2.2.3 Produk Unggulan terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan

Pada penelitian Cornot-Gandolphe (2017) yang menganalisis bagaimana Indonesia berencana untuk mencapai keseimbangan ini dan apa yang bisa menjadi implikasi dari meningkatnya permintaan batubara domestik terhadap ekspor batubara Indonesia, ditemukan bahwa batubara memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PDB Indonesia (diperkirakan sekitar 4 persen) dan pembangunan ekonomi daerah terpencil di mana operasi pertambangan berada.

Pada penelitian Sultan & Haque (2011) yang secara empiris memperkirakan efek permintaan dari perubahan distribusi pendapatan fungsional untuk India, ditemukan bahwa meskipun ekspor memiliki hubungan positif dengan pertumbuhan ekonomi, kontribusinya belum terlihat signifikan.

Pada penelitian Li & Schumann (2013) yang mengusulkan agar strategi *One-Village-One-Product* (OVOP) diterapkan di Guam agar penduduk dapat memperoleh manfaat lebih banyak dari industri pariwisata dengan membangun hubungan dengan pemasok barang dan jasa di Guam, membuktikan bahwa industri pariwisata memiliki potensi untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

2.2.4 Investasi terhadap Penguatan Neraca Perdagangan

Pada penelitian Wilamoski & Tinkler (1999) yang menguji pengaruh penanaman modal asing langsung (FDI) AS di Meksiko terhadap ekspor AS ke dan impor dari Meksiko, ditemukan bahwa FDI AS di Meksiko meningkatkan total ekspor AS ke dan impor dari Meksiko. Hal ini memberikan pengaruh positif kecil pada neraca perdagangan AS dengan Meksiko dari peningkatan FDI, tetapi kontribusi terhadap ekspor dan impor relatif kecil dibandingkan dengan determinan perdagangan lainnya. Dan berdasarkan hasil kausalitas Granger, analisis respon impuls dan dekomposisi varians, mengungkapkan bahwa hubungan antara perdagangan dan FDI yang tidak ditemukan.

Pada penelitian He *et.al*, (2009) yang menguji hubungan antara lonjakan investasi langsung AS & Jepang ke China dan pertumbuhan defisit perdagangan AS dengan China ditemukan bahwa *Direct Investment* perusahaan AS di China meningkatkan ekspor China ke Amerika Serikat sementara menggantikan ekspor barang ke China oleh perusahaan yang berbasis di Amerika Serikat, setidaknya sampai batas tertentu. Hal ini semakin memperburuk defisit perdagangan AS dengan China.

Penelitian Pereira & Calegario (2013) terhadap hubungan perilaku antara FDI dan ekspor dan FDI dan impor di Brazil selama periode 1980-2000 menyimpulkan bahwa FDI menyebabkan ekspor dalam jangka pendek dan jangka panjang dan akan menyebabkan impor dalam jangka pendek, tetapi tidak dalam jangka panjang.

Pada penelitian Ramidi (2014) yang mengidentifikasi kontribusi FDI bruto terhadap permintaan domestik, pertumbuhan ekonomi dan ekspor dalam perekonomian Malaysia, disimpulkan bahwa di Malaysia, FDI masih dianggap penting sebagai instrumen ekonomi untuk mendorong ekspor, permintaan domestik dan pertumbuhan ekonomi.

Pada penelitian Marinela (2015) yang menganalisis dinamika dan struktur investasi asing langsung di Rumania, ditemukan bahwa (1) *Trade Balance* dengan FDI berhubungan negatif selama periode 2008-2013, sedangkan komponen sektor tersier membantu menjaga defisit, meskipun pada tahun-tahun pasca krisis mencatat tren penurunan yang moderat; dan (2) perusahaan-perusahaan dengan FDI berkontribusi positif terhadap defisit perdagangan, yang berdampak negatif pada *Trade Balance*.

Pada penelitian Keho (2020) yang meneliti secara empiris masalah Pantai Gading dalam periode 1980 hingga 2017 ditemukan bahwa (1) *Domestik Income*, nilai tukar efektif riil dan FDI merupakan penggerak penting dari *Trade Balance*; (2)

Depresiasi riil mata uang domestik meningkatkan *Trade Balance* baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek, sehingga konsisten dengan kondisi Marshall-Lerner; sert (3) FDI berdampak buruk pada *Trade Balance* dalam jangka panjang.

2.2.5 Investasi terhadap Peningkatan Permintaan Domestik

Pada penelitian Yenturk (1998) yang mengkaji berbagai faktor yang mempengaruhi investasi perusahaan swasta di sektor *tradeable* dan *non-tradeable*, disimpulkan bahwa di Turki, investasi didorong oleh permintaan domestik.

Pada penelitian Ndikumana (2005) yang mengeksplorasi faktor-faktor penentu investasi dengan menggunakan data tingkat industri agregat dan data terpilah pada 27 sub-sektor sektor manufaktur untuk periode 1970-2001 dan mengeksplorasi efek permintaan dengan memasukkan pertumbuhan PDB riil dalam persamaan investasi, disimpulkan bahwa stimulus permintaan domestik dan ekspansi investasi publik akan menghasilkan keuntungan besar dalam investasi swasta.

Pada penelitian Ramidi (2014) yang mengidentifikasi kontribusi FDI bruto terhadap permintaan domestik, pertumbuhan ekonomi dan ekspor dalam perekonomian Malaysia, disimpulkan bahwa di Malaysia, FDI masih berlaku dan dianggap penting sebagai instrumen ekonomi untuk mendorong ekspor, permintaan domestik dan pertumbuhan ekonomi.

Pada penelitian Hong *et.al*, (2018) yang menyelidiki apakah dan bagaimana *outbond* FDI meningkatkan atau mengurangi lapangan kerja domestik oleh perusahaan multinasional (MNEs), menyimpulkan bahwa FDI ke luar negeri dimotivasi oleh pencarian pasar terkait dengan penurunan permintaan domestik, sedangkan FDI keluar yang dimotivasi oleh pencarian sumber daya tenaga kerja cenderung bertindak sebagai “pengganti strategis” yang mengurangi lapangan kerja domestik oleh MNE.

2.2.6 Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Penelitian Sial *et.al*, (2010) yang menyelidiki peran investasi dalam pertumbuhan ekonomi di Pakistan. Dalam jangka panjang, baik investasi publik maupun swasta menunjukkan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi pertumbuhan tersebut sebagian besar didorong oleh investasi swasta dibandingkan dengan investasi publik.

Pada penelitian Ramidi (2014) yang mengidentifikasi kontribusi FDI bruto terhadap permintaan domestik, pertumbuhan ekonomi dan ekspor dalam perekonomian Malaysia, disimpulkan bahwa di Malaysia, FDI masih dianggap

penting sebagai instrumen ekonomi untuk mendorong ekspor, permintaan domestik dan pertumbuhan ekonomi.

Penelitian Chidoko & Sachirarwe (2015) yang bertujuan untuk mengetahui dampak investasi terhadap pertumbuhan ekonomi Zimbabwe dari tahun 1980 hingga 2013 menemukan bahwa investasi berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Zimbabwe.

Penelitian Menshikov et.al., (2015) di Rusia menjelaskan bahwa faktor utama pertumbuhan ekonomi adalah populasi, investasi, inovasi dan pertukaran pembangunan.

Pada penelitian Iamsiraroj (2016) yang menyelidiki asosiasi pertumbuhan FDI menggunakan pendekatan sistem persamaan simultan dari 124 data lintas negara untuk periode 1971-2010, menyimpulkan bahwa FDI dapat memberikan modal tambahan untuk proses produksi negara tuan rumah, tingkat pertumbuhannya diperkirakan akan meningkat, dan sebaliknya, pertumbuhan negara tuan rumah diharapkan berhubungan positif dengan arus masuk FDI.

Pada penelitian Lin & Benjamin (2018) yang menyelidiki hubungan kausal antara konsumsi energi, foreign direct investment dan economic growth di negara-negara MINT (Malaysia, Nigeria, Indonesia & Turki), ditemukan bahwa terdapat hubungan kausal dua arah antara pertumbuhan ekonomi dan arus masuk FDI di negara-negara MINT.

Penelitian Quoc & Thi (2018) yang mengkaji hubungan antara investasi asing dan pertumbuhan ekonomi di Vietnam dengan bereksperimen dengan model VAR. Hasilnya sesuai dengan teori ekonomi internasional bahwa terdapat keterkaitan antara FDI, GDP, dan Openness to trade. Untuk negara berkembang kecil seperti Vietnam, FDI menyediakan sumber modal yang vital bagi pertumbuhan ekonomi.

Pada penelitian Ali et.al, (2019) yang mengkaji pengaruh variabel makroekonomi, Investasi Langsung Asing dan Neraca Perdagangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDB) pada perekonomian Pakistan dengan menggunakan data 25 tahun (1990-2014), menyimpulkan bahwa PDB namun Penanaman Modal Asing memiliki hubungan positif dengan PDB.

Pada penelitian Dinh et.al, (2019) yang mengkaji dan memberikan bukti kuantitatif tambahan dan relevan tentang dampak penanaman modal asing langsung (FDI) terhadap pertumbuhan ekonomi, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang di negara-negara berkembang dari kelompok berpenghasilan menengah ke bawah pada tahun 2000–2014, menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi jangka panjang didorong oleh jumlah uang beredar, modal manusia, total investasi domestik, dan kredit domestik untuk sektor swasta.

Pada penelitian Srivastava & Talwar (2020) yang mengeksplorasi hubungan antara tiga indikator utama kesehatan ekonomi apa pun, yaitu, indeks pembangunan manusia (IPM), investasi asing langsung (FDI) dan produk domestik bruto (PDB), menyimpulkan bahwa IPM dan FDI merupakan variabel yang signifikan secara statistik yang berpengaruh positif terhadap perubahan PDB. Dampak IPM lebih besar dari FDI.

Penelitian Nguyen & Nguyen (2021) melihat adanya pertentangan pendapat tentang dampak investasi terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga penelitian ini dilakukan untuk menilai dampak sumber investasi seperti investasi publik, investasi swasta, dan investasi asing langsung terhadap pertumbuhan ekonomi di 63 provinsi di Vietnam dalam jangka pendek dan jangka panjang (antara tahun 2000 dan 2020). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam jangka panjang, investasi publik berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan investasi swasta domestik dan investasi asing langsung berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Penelitian Mohi & Dai (2022) yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh investasi dan tenaga kerja terhadap kinerja perekonomian daerah di 34 provinsi di Indonesia pada periode 2010-2020. Hasil analisis menunjukkan bahwa investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja ekonomi.

Penelitian Ocolisanu et.al, (2022) menemukan bahwa dalam literatur empiris menyajikan hasil yang kontradiktif. Studi ini merupakan penyelidikan empiris terhadap dampak investasi publik terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di negara-negara UE dan Eropa Tengah yang sedang berkembang pada periode 1995–2019. Hasilnya, di sebagian besar negara yang termasuk dalam sampel, dampak jangka panjang guncangan modal publik terhadap PDB diperkirakan negative

2.2.7 Penguatan Neraca Perdagangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Pada penelitian Pacheco-López (2003) yang mengkaji dampak liberalisasi perdagangan pada neraca perdagangan dan neraca pembayaran di Meksiko, ditemukan bahwa peningkatan elastisitas pendapatan dari permintaan impor, yang belum dikompensasi oleh tingkat pertumbuhan ekspor yang lebih tinggi, telah berkontribusi pada perlambatan tingkat pertumbuhan ekuilibrium jangka panjang Meksiko.

Pada penelitian Alvarado et al (2018) yang menguji pengaruh ekspor dan permintaan internal terhadap pertumbuhan ekonomi di 28 negara Amerika Latin, didapati kesimpulan bahwa pada negara-negara berpenghasilan tinggi, menyimpulkan bahwa di negara-negara berpenghasilan tinggi ekspor memainkan

peran yang lebih penting daripada permintaan internal dalam meningkatkan output, sementara di negara-negara berpenghasilan menengah ke atas, pengaruh permintaan internal mendominasi.

Pada penelitian Ali et.al, (2019) yang mengkaji pengaruh variabel makroekonomi, Investasi Langsung Asing dan Neraca Perdagangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDB) pada perekonomian Pakistan dengan menggunakan data 25 tahun (1990-2014), menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel bebas Penanaman Modal Asing dan Neraca Perdagangan terhadap variabel terikat PDB, sementara Neraca Perdagangan memiliki hubungan negatif dengan PDB.

Hasil penelitian Astuti (2018), bahwa jumlah ekspor berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Hal tersebut sejalan dengan teori perdagangan internasional, apabila jumlah barang atau jasa yang di ekspor ke luar negeri semakin banyak maka di dalam negeri harus memproduksi barang dan jasa lebih banyak juga. Semakin banyak barang yang di ekspor ke luar negeri maka arus modal yang masuk ke dalam negeri juga dalam jumlah yang banyak. Arus modal masuk tersebut yang akan dikelola melalui pendanaan modal untuk usaha besar, kecil dan menengah. Hal tersebut akan meningkatkan jumlah output baik barang dan jasa yang akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang.

Pada penelitian Blavasciunaite et.al, (2020) yang menyelidiki dampak neraca perdagangan terhadap pertumbuhan ekonomi serta mengevaluasinya selama periode defisit perdagangan, menyimpulkan bahwa dampak negatif dan tertinggal dari neraca perdagangan terhadap pertumbuhan ekonomi, dan tidak ada perbedaan signifikan dari dampak yang diidentifikasi selama periode defisit, namun ada kemungkinan efek non-linier, yang akan menunjukkan dampak negatif yang lebih kuat pada pertumbuhan ekonomi ketika neraca perdagangan memburuk dengan adanya defisit perdagangan yang besar.

Penelitian Coupet Jr. (2020) menyimpulkan hubungan kausal antara neraca perdagangan Amerika Serikat dan produk domestik brutonya menggunakan Model Koreksi Kesalahan Vektor Johansen, mendapati bahwa neraca perdagangan AS tidak menyebabkan pertumbuhan ekonomi AS dalam jangka pendek, maupun dalam jangka panjang.

Pada penelitian Izevbigie et.al, (2020) yang mengkaji dampak terhadap pertumbuhan ekonomi di sub-kawasan Afrika Barat dengan data sekunder periode 2007 hingga 2019, menyimpulkan bahwa Neraca perdagangan memberikan dampak negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

2.2.8 Peningkatan Permintaan Domestik terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Pada penelitian Yeh Wah (2004) yang mengkaji kembali peran permintaan domestik dalam pertumbuhan ekonomi di Malaysia, menyimpulkan bahwa dampak positif yang sangat signifikan dari pengeluaran domestik terhadap pertumbuhan ekonomi menyiratkan bahwa penggunaan permintaan domestik sebagai katalis pertumbuhan adalah tepat.

Pada penelitian Tsen (2010) yang meneliti kausalitas Granger antara ekspor, permintaan domestik dan pertumbuhan ekonomi di Cina menggunakan data deret waktu selama periode 1978-2002, menyimpulkan bahwa ekspor dan permintaan domestik sama-sama penting bagi pertumbuhan ekonomi di China.

Pada penelitian Jarra (2013) yang berusaha menemukan hubungan kausal antara ekspor, permintaan domestik dan pertumbuhan ekonomi di Ethiopia menggunakan data deret waktu selama periode 1960 hingga 2011, menyimpulkan bahwa ekspor dan permintaan domestik penting untuk pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi berdampak pada ekspor dan permintaan domestik di Ethiopia.

Pada penelitian Alvarado (2018) yang menguji pengaruh ekspor dan permintaan internal terhadap pertumbuhan ekonomi di 28 negara Amerika Latin, didapati kesimpulan bahwa pada negara-negara berpenghasilan tinggi, menyimpulkan bahwa di negara-negara berpenghasilan tinggi kami menemukan bahwa ekspor memainkan peran yang lebih penting daripada permintaan internal dalam meningkatkan output, sementara di negara-negara berpenghasilan menengah ke atas, pengaruh permintaan internal mendominasi.

Penelitian Tampubolon & Adalakun (2021) yang menggunakan pendekatan akuntansi pertumbuhan untuk menentukan DDLG dan autoregressive distribution lag (ARDL) bound test terhadap kointegrasi untuk mengetahui pengaruh permintaan domestik terhadap pertumbuhan ekonomi pada sistem ekonomi tertutup dan terbuka. Studi tersebut mengungkapkan bahwa perekonomian Indonesia dicirikan oleh DDLG pada periode 2000 - 2018, dan dalam sistem ekonomi terbuka, permintaan domestik dan ekspor berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Halaman Ini Sengaja Dikosongkan